

# **PENGEMBANGAN PERMUKIMAN DI KAWASAN PERBATASAN SEBAGAI BERANDA TERDEPAN NKRI**

## **Studi Kasus: Kabupaten Nunukan Kalimantan Timur**

**Oleh: Kuswara**

Pusat Litbang Permukiman Jl. Panyaungan, Cileunyi Wetan – Kab. Bandung 40393

E-mail : kswtea@yahoo.com

Tanggal masuk naskah: 09 Januari 2008 , Tanggal revisi terakhir : 15 Juli 2008

### **Abstrak**

*Fenomena perkembangan kawasan perbatasan dengan negara tetangga menunjukkan semakin strategisnya kawasan perbatasan disatu sisi sementara di sisi lain kawasan ini secara umum masih sangat terbelakang dibandingkan kawasan lain di Indonesia. Untuk itu diperlukan upaya percepatan pengembangan kawasan perbatasan. Berkaitan dengan pengembangan kawasan perbatasan, salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah keberadaan permukiman yang ada di kawasan ini. Upaya pengembangan permukiman ini dilakukan dalam rangka mengubah paradigma pembangunan di kawasan perbatasan dari paradigma "halaman belakang" menjadi "halaman depan" dan dilakukan dengan pendekatan yang seimbang dan terpadu antara pendekatan keamanan (security approach) dan pendekatan kesejahteraan (prosperity approach). Dalam pengembangan paradigma pembangunan tersebut, peran permukiman memegang peranan yang sangat penting karena menjadi salah satu aktivitas terdepan yang ada di kawasan perbatasan. Untuk mendukung hal itu, maka diperlukan upaya untuk menemukenali tantangan pengembangan permukiman sebagai dasar untuk menentukan arah pengembangannya yang sesuai sehingga permukiman di kawasan perbatasan dapat menjadi beranda terdepan atau welcome window wilayah NKRI.*

**Kata Kunci:** Perbatasan negara, permukiman, beranda terdepan

### **Abstract**

*International border area of Indonesia has significant role for political, security and economic aspects. But in contrast, currently the area is categorized as underdeveloped area. In regard to the condition, in order to force development of the area, the government has changed concept for development of international border area from inward looking to forward looking and the area is intended to be front line or foreground of Indonesia. In order to respond the concept, one of aspects that should be addressed is on development of human settlement. Human settlement should be able to support economic and social development on the border area. In order to develop appropriate human settlements development, it should be acquainted characterized and challenge of human settlement in the area as a basis for formulation of guideline on developing human settlement in order to support development border area.*

**Keywords:** International border area, human settlements, foreground

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Wilayah perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memiliki nilai strategis baik dari aspek politik dan keamanan maupun aspek sosial ekonomi dan budaya. Salah satu contoh nilai strategis tersebut adalah adanya potensi kandungan sumber daya alam yang cukup besar diantaranya hutan, gas, dan minyak bumi seperti yang terdapat dalam wilayah Kabupaten Nunukan Kalimantan Timur. Dalam perkembangannya, kawasan perbatasan ini mengalami ketertinggalan dibanding dengan kawasan lain di Indonesia maupun dengan kawasan perbatasan negara tetangga. Berdasarkan hal itu, GBHN 1999 yang ditindaklanjuti dengan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009 telah mengamanatkan bahwa kawasan perbatasan merupakan kawasan tertinggal yang harus mendapat prioritas dalam pembangunan.

Prioritas ini dimaksudkan untuk mempercepat perkembangan pembangunan di kawasan perbatasan dan mengurangi kesenjangan dengan wilayah lain di Indonesia maupun dengan wilayah negara tetangga. Salah satu upaya untuk memacu perkembangan kawasan perbatasan adalah dengan menyediakan sarana dan prasarana di wilayah ini maupun yang menghubungkannya dengan wilayah lain di Indonesia. Sarana dan prasarana ini harus mampu mendorong perkembangan kawasan perbatasan. Salah satu sarana dan prasarana yang perlu menjadi perhatian adalah sarana dan prasarana permukiman. Perhatian terhadap permukiman ini menjadi

sangat penting mengingat kawasan permukiman merupakan aktivitas yang memanfaatkan ruang terbesar di kawasan budi daya. Selain itu keberadaan permukiman ini dapat menjadi pemacu perkembangan kawasan sekaligus penanda eksistensi keberadaan masyarakat dan menjadi pintu gerbang Indonesia dengan tetangga. Berdasarkan hal tersebut sejak tahun 2006 Puslitbang Permukiman mengadakan penelitian mengenai dukungan infrastruktur untuk pengembangan kawasan perbatasan. Salah satu aspek yang dibahas adalah mengenali tantangan yang dihadapi dalam pengembangan permukiman di kawasan perbatasan.

### **Maksud dan Tujuan**

Tulisan ini dimaksudkan sebagai bahan masukan dalam pengembangan permukiman di kawasan perbatasan. Sedangkan tujuannya adalah memaparkan tantangan yang dihadapi dalam pengembangan permukiman dengan dasar visi dan misi menjadikan permukiman di kawasan perbatasan sebagai beranda terdepan NKRI dan pemacu pengembangan kawasan. Untuk itu, dalam tulisan ini dikemukakan bagaimana tantangan pengembangan permukiman serta langkah-langkah dan strategi yang perlu dilakukan dalam pengembangan permukiman di kawasan perbatasan khususnya dalam lingkup wilayah Kabupaten Nunukan.

### **Metoda**

Dalam kajian ini digunakan metoda deskriptif analitis dengan unit analisis wilayah Kabupaten Nunukan sebagai salah satu kabupaten yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Berdasarkan unit analisis di atas, kajian dilakukan tidak hanya terhadap permukiman di

sepanjang garis batas tetapi terhadap keseluruhan wilayah Kabupaten Nunukan. Hal itu disebabkan adanya keterkaitan dan ketergantungan antar satu wilayah permukiman dengan wilayah permukiman lainnya.

## TINJAUAN PUSTAKA

### **Nilai Strategis dan Paradigma Pembangunan Kawasan Perbatasan**

Wilayah perbatasan adalah wilayah geografis yang berhadapan dengan negara tetangga, dimana penduduk yang bermukim di wilayah tersebut disatukan melalui hubungan sosio-ekonomi, dan sosio-budaya dengan cakupan wilayah administratif tertentu setelah ada kesepakatan antarnegara yang berbatasan. Batas yang memisahkan antara wilayah negara dapat berupa batas alam seperti sungai, gunung, bukit, dan danau maupun batas yang dibuat berdasarkan perjanjian seperti tugu batas.

Kawasan perbatasan merupakan kawasan strategis karena letaknya yang langsung berhadapan dengan negara lain. Nilai strategis tersebut ditunjukkan antara lain oleh karakteristik sebagai berikut (Progo, 2003 dalam Puslitbang Permukiman 2006):

1. Mempunyai dampak penting bagi kedaulatan negara
2. Merupakan faktor pendorong bagi peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat di sekitarnya
3. Mempunyai keterkaitan yang saling mempengaruhi dengan kegiatan yang dilaksanakan di wilayah lainnya yang berbatasan wilayah maupun antar negara
4. Mempunyai dampak terhadap kondisi pertahanan dan keamanan, baik skala regional maupun nasional.

Namun nilai strategis itu pada saat ini belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Hal itu disebabkan paradigma pengelolaan kawasan perbatasan dimasa lampau sebagai halaman belakang wilayah NKRI. Munculnya paradigma ini disebabkan oleh sistem politik di masa lampau yang sangat sentralistik dan sangat menekankan stabilitas keamanan. Disamping itu secara historis, hubungan Indonesia dengan beberapa negara tetangga pernah dilanda konflik, serta terjadinya pemberontakan-pemberontakan di dalam negeri (Bappenas, 2004). Penetapan kebijakan pembangunan wilayah perbatasan dengan pendekatan keamanan saja ternyata tidak cukup hal ini diindikasikan dengan kondisi perbatasan saat ini yang terisolir dan tertinggal dari sisi ekonomi sosial dan ekonomi. Kondisi ini menyebabkan ketergantungan penduduk di kawasan ini lebih cenderung kepada negara tetangga. Hal lainnya adalah potensi kehilangan sumberdaya alam, misalnya karena terjadi kegiatan *illegal logging* dan *illegal fishing*.

Kondisi itu menyebabkan dirasakan pentingnya upaya untuk mengurangi ketertinggalan dan keterisolasian kawasan perbatasan. Berdasarkan kondisi tersebut, Pemerintah Indonesia saat ini menggunakan paradigma baru, arah kebijakan pembangunan yang selama ini cenderung berorientasi *inward looking* menjadi *outward looking*, sehingga kawasan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga melalui peningkatan kesejahteraan maupun keamanan.

## Permukiman dan Pengembangan Wilayah

Konsep pengembangan wilayah dimaksudkan untuk memperkecil kesenjangan pertumbuhan dan ketimpangan kesejahteraan antar wilayah. Salah satu komponen dalam pengembangan wilayah yang sangat penting adalah keberadaan permukiman dalam suatu kawasan. Permukiman sebagai aktivitas yang memanfaatkan ruang terbesar dari kawasan budi daya serta landasan bagi produktivitas ekonomi dan sosial masyarakat dan menunjukkan eksistensi keberadaan masyarakat. Dengan demikian pengembangan permukiman dapat menjadi pemacu (*triger*) untuk pengembangan wilayah dalam rangka mengurangi kesenjangan antar daerah atau kawasan. Pemacu ini antara lain terkait dengan keberadaan pusat aktivitas ekonomi dan sosial budaya yang menjadi ciri keberadaan suatu permukiman.

Dalam kaitan itu ada tiga kelompok konsep pengembangan wilayah yaitu konsep pusat pertumbuhan, konsep integrasi fungsional, dan konsep pendekatan desentralisasi (Alkadri, et al, 1999). Konsep pusat pertumbuhan menekankan pada perlunya melakukan investasi secara besar-besaran pada suatu pusat pertumbuhan atau wilayah/kota yang telah mempunyai infrastruktur yang baik. Pengembangan wilayah di sekitar pusat pertumbuhan diharapkan melalui proses tetesan ke bawah (*tricle down effect*).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Umum Kabupaten Nunukan

Kabupaten Nunukan terbentuk atas dasar UU No. 45 Tahun 1999, hasil

pemekaran Kabupaten Bulungan sebagaimana diubah dengan UU No. 7 Tahun 2000. Hasil pemekaran tersebut adalah kabupaten yang terdiri dari 7 kecamatan dan 218 kelurahan/desa. Luas wilayah daratan adalah 13.917,76 km<sup>2</sup> dan luas perairan lautnya 1.408,76 km<sup>2</sup>.

Kabupaten ini berbatasan langsung dengan Serawak dan Sabah Malaysia, dengan garis perbatasan (baik darat maupun laut) sepanjang 466,87 km. Wilayah ini terletak menghadap ke Laut Sulawesi/ Selat Makassar yang merupakan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI II).



Gambar 1. Batas Administrasi Wilayah Kabupaten Nunukan

Jumlah penduduk Kabupaten Nunukan dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Pada tahun awal berdirinya Nunukan sebagai kabupaten baru, jumlah penduduk kabupaten ini adalah 79.620 jiwa. Dalam perkembangan selanjutnya, seiring dengan pembangunan yang terus dilaksanakan, jumlah penduduk mengalami perkembangan yang cukup pesat. Pada tahun 2004 jumlah penduduk Kabupaten Nunukan mencapai 106.908 jiwa, dengan laju pertumbuhan sebesar 1,95%.

Pola persebaran penduduk di Kabupaten Nunukan dapat dikatakan belum merata yang dicirikan dengan perbedaan tingkat kepadatan penduduk yang cukup mencolok antar kecamatan. Sebagian

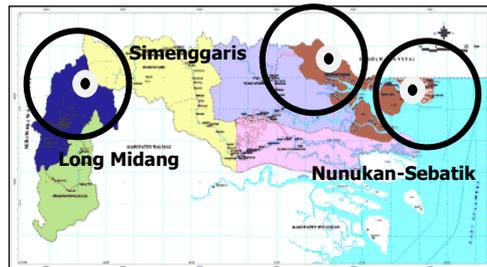
besar penduduk terpusat di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Nunukan dan Kecamatan Sebatik. Jumlah penduduk yang tinggal di Kecamatan Nunukan sekitar 44.669 jiwa dengan kepadatan rata-rata 30,94 jiwa per km<sup>2</sup>. Hal ini sangat berbeda dengan Kecamatan Krayan yang mempunyai kepadatan penduduk yang sangat rendah, yaitu sebesar 2,47 jiwa per km<sup>2</sup>. Pola persebaran penduduk yang tidak merata ini kurang menguntungkan bagi pengembangan daerah, terutama akan menimbulkan kesenjangan antar daerah yang satu dengan yang lain.

**Tabel 1.**  
**Persebaran dan Kepadatan Penduduk Tahun 2000-2004**

Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)		Kepadatan (per km <sup>2</sup> )	
	2000	2004	2000	2004
Krayan	8.666	8.879	2,41	2,47
Lumbis	7.498	8.589	2,21	2,53
Sembakung	5.804	6.892	2,55	3,02
Nunukan	29.520	44.669	20,45	30,94
Sebatik	21.066	28.238	85,42	114,50
Sebuku	7.066	9.641	2,14	2,91
Total	79.620	106.908	5,58	7,50

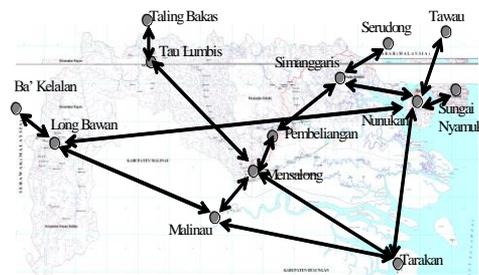
Sumber: BPS Kabupaten Nunukan Tahun 2004

Pada saat ini di Kabupaten Nunukan telah dikembangkan 3 kawasan pusat pertumbuhan yaitu kawasan pusat pertumbuhan Nunukan – Sebatik, Simenggaris dan Long Midang. Ketiga kawasan pusat pertumbuhan ini saling berhubungan melalui akses laut, darat dan udara. Prasarana pendukung antar wilayah adalah pelabuhan laut Tunon Taka dan Lamijung serta bandar udara Tarakan.



**Gambar 2. Pusat Pertumbuhan di Kabupaten Nunukan**

Pusat pertumbuhan di Kabupaten Nunukan yang paling berkembang adalah Nunukan – Sebatik. Hal ini disebabkan adanya pusat transit yang menghubungkan kawasan ini dengan pertumbuhan diluar Kabupaten Nunukan, misalnya Tarakan dan Tawau (Malaysia).



Sumber: Hasil Pengamatan Lapangan, 2006

**Gambar 3. Aksesibilitas antar Pusat Pertumbuhan**

### Perumahan dan Permukiman

Jenis perumahan dan permukiman di Kabupaten Nunukan pada setiap kawasan pertumbuhan mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Hal ini disebabkan secara topografis, tata guna lahan dan jumlah serta karakteristik penduduk yang berbeda.

Pada pusat pertumbuhan Long Midang yang meliputi antara lain wilayah Kecamatan Krayan berada di dataran tinggi dan sebagian besar wilayahnya termasuk pada kawasan Taman Nasional, jenis permukimannya memusat dengan pola grid mengikuti

pola jalan desa. Sebelumnya terdapat beberapa dusun yang lokasinya berpencar-pencar. Namun karena adanya status Taman Nasional, maka beberapa dusun tersebut dipindahkan ke Long Layu, Long Bawan dan Long Midang. Pusat pemerintahan terletak di Long Bawan dan Long Layu. Keberadaan pusat pertumbuhan Long Midang yang berada dalam taman nasional menyebabkan tidak memungkinkannya untuk pengembangan sektor yang memerlukan lahan besar. Dengan demikian pengembangan permukiman di kawasan inipun menjadi relatif terbatas dan secara khusus perlu memperhatikan fungsi taman nasional.

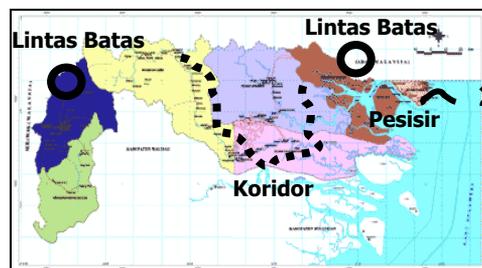
Kawasan Simenggaris secara topografis melandai dan dilewati oleh banyak sungai. Oleh karena itu, kawasan permukiman terdapat disepanjang aliran sungai. Pemilihan tempat tinggal di sepanjang sungai karena akses yang mudah menuju lokasi lain, terutama untuk proses distribusi. Lahan selain sepanjang sungai tersebut relatif tidak berpenghuni dan mayoritas merupakan kawasan perkebunan. Guna lahan di kawasan pertumbuhan Simenggaris didominasi oleh budidaya kehutanan. Oleh karena itu, Pemda Nunukan melaksanakan program transmigrasi. Wilayah yang ditetapkan sebagai lokasi transmigrasi adalah Sebuku dan Simenggaris. Berdasarkan hal itu Pemkab Nunukan kemudian menyiapkan penempatan ratusan kepala keluarga transmigran di beberapa satuan permukiman di Semenggaris. Pada bulan Maret 2006 Bupati Nunukan menyerahkan 1.040 sertifikat lahan kepada warga transmigrasi Kecamatan Nunukan Barat dan Kecamatan Sebuku. Masing-masing mendapat lahan pekarangan dengan luas seperempat

hektar dan lahan usaha seluas tigaperempat hektar.

Di kawasan pusat pertumbuhan Nunukan – Sebatik, jenis permukiman secara umum termasuk permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan dengan tingkat kepadatan dan pertumbuhan yang relatif tinggi. Hal ini disebabkan adanya prasarana pendukung yang menghubungkan kawasan ini dengan pusat pertumbuhan di luar Kabupaten Nunukan, misalnya Kota Tarakan dan juga Kota Tawau di Malaysia. Prasarana pendukung itu antara lain pelabuhan laut Tunon Taka, pelabuhan Lamijung, dan Bandara Nunukan. Selain itu kawasan ini menjadi tempat transit bagi para TKI yang akan memasuki ataupun yang kembali dari Malaysia. Saat ini Kota Nunukan merupakan kota dengan orde II dan menjadi pusat aktivitas jasa dan perdagangan di Kabupaten Nunukan.

### Tantangan Pengembangan Permukiman di Wilayah Kabupaten Nunukan

Apabila dilihat berdasarkan tipologi, secara garis besar terdapat 3 (tiga) pola permukiman yang berada di Kabupaten Nunukan yaitu permukiman lintas batas, koridor, dan kawasan pesisir. Ketiga pola ini mempunyai tantangan perkembangan yang berbeda-beda karena perbedaan topografi, demografi, dan rencana yang telah ada.



Gambar 4. Tipologi Pola Permukiman

### 1. Perkembangan Permukiman Lintas Batas

Permukiman lintas batas ini antara lain terdapat di Kawasan Pertumbuhan Ekonomi (KPE) Long Midang Kecamatan Krayan yang sebagian wilayahnya merupakan Kawasan Pusat Perlindungan Taman Nasional Kayan Mentarang. Pola perumahannya berbentuk *grid*. Intensitas lintas batasnya tinggi, karena aktifitas ekonomi dengan Malaysia di permukiman ini tinggi. Dilihat dari lokasinya, perumahan dikawasan ini berdiri secara terpencar-pencar dalam kelompok-kelompok kecil perkampungan. Masyarakat yang mendiami permukiman di kawasan ini didominasi oleh Suku Dayak. Peranan ketua adat atau ketua suku masih memegang peran sentral dalam tatanan kehidupan masyarakat. Hal ini menjadi modal dasar dalam pemanfaatan infrastruktur agar dapat dikelola dengan baik.

Peningkatan sarana dan prasarana transportasi sangat diperlukan, baik hubungannya dengan wilayah lain di Indonesia maupun dengan wilayah Malaysia seperti perluasan bandara dan jalan akses. Perlunya peningkatan aksesibilitas terhadap pusat kegiatan di Nunukan, agar dapat menjual komoditas unggulan dengan harga normal untuk meningkatkan ekonomi lokal.

### 2. Perkembangan Permukiman Koridor

Permukiman ini berkembang secara alami mengikuti jalur jalan yang sudah ada, atau mengikuti jalur sungai yang umumnya mengikuti arah utara-selatan (vertikal), sedangkan kawasan perbatasan membentang dari barat ke timur (horisontal). Pembangunan per-

mukiman koridor yang mengikuti jalur jalan bisa menjadi tantangan ke depan, karena untuk keperluan keamanan pola permukiman koridor sebaiknya dapat menjadi pagar pemelihara, penjaga dan pengendali batas wilayah dua negara, tanpa mengganggu fungsi atau kesesuaian lahan. Namun, kecenderungan perubahan fungsi lahan kawasan hutan menjadi kawasan perkebunan yang cukup tinggi, seperti perkebunan kelapa sawit. Dalam areal yang luas perlu diperhitungkan kemampuan daya dukung lahan dalam menyerap sumber daya air untuk kelangsungan hidup jangka panjangnya. Adanya program transmigrasi yang ditempatkan di Sebuku dan Nunukan harus pula diperhatikan daya dukung lahannya, mengingat ketersediaan air bersih yang tidak mencukupi di kedua lokasi tersebut. Selain itu, ketersediaan air untuk pertanian dan industri pengolahan perlu memanfaatkan air sungai, dimana sungai tersebut bergantung pada keberhasilan upaya konservasi.

### 3. Perkembangan Permukiman Kawasan Pesisir

Kecenderungan pembangunan yang pesat di kawasan pesisir, didorong oleh adanya akses melalui jalur transportasi laut. Di kawasan Nunukan dan Sebatik perkembangan permukiman ini menjadi tantangan yang harus dicermati dengan serius, karena terkait dengan berbagai faktor, seperti penyediaan air bersih, abrasi pantai, perkembangan sarana dan prasarana penyeberangan, penyediaan infrastruktur sepanjang jalan lingkar, serta permukiman nelayan. Selain itu, Nunukan Sebatik adalah

pulau kecil, sehingga harus dapat perlakuan atau pertimbangan khusus untuk menjaga stabilitas ekologis lingkungan wilayah tersebut.

Berdasarkan ketiga tipologi permukiman tadi, terdapat kesamaan tantangan terkait dengan keberlanjutan pembangunan. Tantangan ini terkait dengan upaya untuk menjaga keseimbangan lingkungan mengingat wilayah sangat kaya akan interaksi ekosistem darat-laut dan pulau-pulau kecil dengan keterbatasan daya dukung di satu sisi. Tetapi di sisi lain tekanan penduduk menjadi semakin besar di dalam menggunakan sumber daya alam yang ada.

### **Konsep Arahan Pengembangan Permukiman dan Sarana Prasarana Pendukungnya**

Arahan pengembangan pusat-pusat permukiman serta sistem sarana dan prasarana yang direncanakan harus berakar dari potensi dan kendala yang dimiliki oleh wilayah yang bersangkutan. Dengan demikian pusat-pusat permukiman tersebut akan dapat mampu mendukung dan bersinergi sesuai dengan karakteristik khusus kawasan di sekitarnya. Untuk mengembangkannya diperlukan strategi-strategi utama sebagai berikut:

1. Penetapan lokasi-lokasi yang akan dikembangkan
2. Pengembangan fasilitas dan infrastruktur penunjang di masing-masing kawasan sesuai karakteristik dan kebutuhannya masing-masing.
3. Pengembangan keterkaitan ruang permukiman antar berbagai kawasan tersebut.

Dengan karakteristik tantangan permukiman seperti diuraikan diatas, maka pengembangan permukiman di wilayah

Kabupaten Nunukan perlu berorientasi ekologi dengan maksud untuk menjaga keseimbangan konservasi air dan tanah. Dengan orientasi ekologi ini maka akan tercipta:

1. Pemeliharaan proses-proses ekologis yang penting dan sistem penunjang kehidupan darat dan laut yang merupakan tempat berinteraksi sosial dan politik
2. Konservasi keragaman genetik hutan dapat dimanfaatkan sebagai ilmu pengetahuan, inovasi teknis, dan keamanan banyak pelaku agroindustri yang menggunakan sumber daya kehidupan
3. Secara umum, akan menjamin keberlanjutan dan keseimbangan pembangunan wilayah dan ekosistem yang menunjang kehidupan bangsa.

Dilihat dari aspek keruangan, dengan memperhatikan isu strategis, visi, dan misi pengembangan Kabupaten Nunukan, maka permukiman di kawasan perbatasan Nunukan dapat dikembangkan dengan menggunakan konsep keuntungan dari keterkaitan ruang (*spatial linkages advantageous development concept*). Konsep ini digunakan karena Nunukan memiliki dua karakteristik spesifik, yakni sebagai wilayah perbatasan dan sekaligus sebagai simpul perdagangan regional. Kedua karakteristik tersebut akan sangat berpengaruh pada perkembangan wilayah dan fungsi permukiman yang harus diemban dalam rangka meningkatkan keterkaitan dengan wilayah lain (Nunu Noviandi dalam Alkadri dan Hamid, 2003).

Salah satu implementasi dari konsep di atas adalah dengan mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan yang telah ada serta meningkatkan fungsi kota-kota kecamatan atau satuan permukiman

yang ada dengan memperhatikan keterkaitan antar kawasan (*spatial linkages*). Peningkatan dan pengembangan fungsi serta keterkaitan ini dalam rangka mensejajarkan kapabilitas pusat-pusat permukiman di Kabupaten Nunukan dengan kapabilitas wilayah-wilayah di sekitarnya yang telah berkembang menjadi salah satu simpul distribusi perdagangan intraregional.

Untuk mendukung konsep pengembangan tadi, ketersediaan sarana dan prasarana merupakan prasyarat bagi bergulirnya kegiatan peningkatan kapabilitas wilayah Kabupaten Nunukan baik secara fisik, sosial dan ekonomi. Minimnya infrastruktur wilayah di kawasan perbatasan tidak lepas dari strategi pembangunan daerah yang telah dilaksanakan, dimana pembangunan yang dilakukan hanya di kota-kota besar, sedangkan pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan sering terlupakan. Memperluas ketersediaan sarana dan prasarana dapat berarti memperbanyak sarana dan prasarana maupun meningkatkan kapasitas pelayanan sarana dan prasarana yang sudah ada. Peningkatan kegiatan ekonomi dan investasi memerlukan dukungan ketersediaan infrastruktur dasar, seperti sarana permukiman, air bersih, sampah, drainase, sarana dan prasarana transportasi darat, laut dan udara serta infrastruktur telekomunikasi dan informasi yang cukup memadai pula.

Dukungan infrastruktur permukiman kawasan perbatasan dapat dilakukan antara lain dengan :

1. Pembagian ruang dengan dasar kesesuaian fisik dan fungsional untuk pengembangan sektor unggulan dan konservasi sumber daya alam.

2. Pengembangan infrastruktur distribusi, seperti jaringan transportasi pada lokasi-lokasi yang memiliki potensi untuk mengembangkan produk unggulan serta pengembangan simpul transportasi yang dapat melayani pergerakan lintas batas negara.
3. Peningkatan area dan kualitas pelayanan air bersih, sanitasi, limbah serta sistem drainase melalui penerapan teknologi tepat guna dalam rangka menjaga keseimbangan lingkungan dan aktifitas ekonomi sosial setempat.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

1. Pengembangan permukiman kawasan perbatasan berbeda dengan kawasan pada umumnya, karena mempunyai aktifitas lintas batas negara yang berpengaruh terhadap ekonomi dan keamanan negara. Aktifitas lintas batas ini berupa pergerakan manusia dan barang antar daerah di wilayah negara tetangga dengan daerah di dalam Indonesia, serta aktifitas persinggahan bagi para Tenaga Kerja Indonesia (TKI).
2. Tantangan pengembangan perumahan dan permukiman di wilayah Kabupaten Nunukan meliputi masalah ketimpangan pembangunan dengan wilayah lain di Indonesia maupun dengan wilayah negara bagian Sabah Serawak. Hal ini diakibatkan keterisolasian kawasan serta kualitas perumahan, sarana dan prasarana yang masih kurang memadai.
3. Untuk menjawab tantangan tersebut serta dalam upaya menjadikan permukiman di kawasan perbatasan sebagai beranda terdepan NKRI maka salah satu konsep pe-

ngembangan yang perlu dilakukan adalah dengan mengembangkan pusat-pusat permukiman baru melalui meningkatkan fungsi-fungsi ibukota kecamatan dan satuan-satuan permukiman yang telah ada. Pengembangan pusat-pusat permukiman ini dilakukan dengan cara membuka isolasi kawasan melalui dukungan sarana dan prasarana serta mengoptimalkan sektor-sektor unggulan. Hal ini dimaksudkan untuk mengembangkan ekonomi lokal serta menarik orientasi penduduk ke dalam wilayah Indonesia.

4. Selanjutnya konsep pengembangan ini terutama dalam pengembangan pusat-pusat pertumbuhan dan keseimbangan ekologis dalam pembangunan perlu diterjemahkan secara lebih nyata pada strategi pengembangan spasial. Pengembangan secara spasial ini terutama pada arahan dan keterkaitan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan dan lokasi khusus untuk pengembangan kawasan permukiman secara detail.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alkadri, et al, 1999, *Tiga Pilar Pengembangan Wilayah*. BPPT. Jakarta
- Alkadri dan Hamid, 2003. *Model, dan Strategi Pengembangan Kawasan Perbatasan Kabupaten Nunukan*. Pusat Pengkajian Kebijakan Teknologi Pengembangan Wilayah BPPT
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Nunukan, 2004. *Indikator Sosial Kabupaten Nunukan 2004*.
- Departemen Pekerjaan Umum , 1994. *Dukungan Prasarana dan Sarana Dasar PU dalam Upaya Percepatan Pembangunan Kawasan Perbatasan*. Jakarta.
- Bappenas, 2004. *Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Kawasan Perbatasan Antar-negara di Indonesia*.
- Pemerintah Kabupaten Nunukan. 2005. *Rencana Tindak Kebijakan dan Strategi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal*.
- Puslitbang Permukiman, 2006, *Kajian Pembangunan Infrastruktur Ke-Pu-an untuk Mendukung Peningkatan Fungsi Kawasan Perbatasan*, Laporan Akhir